

Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali

Sang Ayu Diah Kartika Devi ⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada ⁽²⁾

I Made Endra Lesmana ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Bali, Indonesia

e-mail: sangayu00@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Institutional Level Financial Application System (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI) in improving the efficiency of government financial management. The study was conducted at the Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of Bali Province using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation to ensure validity. The results show that SAKTI enhances the integration of financial processes, improves data accuracy, and accelerates financial reporting. The system also increases work efficiency by reducing manual administrative tasks and simplifying reconciliation processes. However, challenges remain, including technical disruptions, limited user competence, and coordination constraints. Overall, SAKTI contributes to more efficient, integrated, and accountable financial management, although further improvements are required to optimize its implementation.

Keywords: SAKTI, financial management, efficiency, public sector accounting, information system

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kerangka normatif yang mengatur prinsip, basis, dan karakteristik penyajian laporan keuangan sektor publik di Indonesia. Penerapan SAP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara akuntabel, transparan, relevan, andal, serta dapat dibandingkan antarperiode dan antarentitas. Dalam praktiknya, SAP menjadi landasan utama dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sekaligus instrumen penting bagi pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun demikian, keberhasilan penerapan SAP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi keuangan yang mampu mengolah transaksi secara terintegrasi dan konsisten.

Seiring dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan akan sistem informasi keuangan yang terintegrasi menjadi semakin penting. Transformasi menuju

akuntansi berbasis akrual menuntut instansi pemerintah tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mampu menggambarkan kondisi keuangan secara komprehensif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, implementasi SAP berpotensi menghadapi berbagai kendala seperti ketidaktepatan pencatatan transaksi, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, serta inkonsistensi data antar sistem (Anwar & Hadi, 2022; Veronika et al., 2022). Oleh karena itu, keberadaan sistem aplikasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih terintegrasi, pemerintah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem informasi keuangan yang digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. SAKTI dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan negara dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Sistem ini menggantikan berbagai aplikasi keuangan yang sebelumnya digunakan secara terpisah sehingga diharapkan mampu menghasilkan data keuangan yang lebih terstandar, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan SAP. Penelitian Anwar dan Hadi (2022) menunjukkan bahwa implementasi SAKTI yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) telah berjalan sesuai dengan regulasi dan mendukung proses penyusunan laporan keuangan, khususnya melalui Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP).

Dalam konteks penerapan SAP, SAKTI memiliki peran strategis sebagai sarana teknis implementasi akuntansi berbasis akrual di tingkat instansi pemerintah. Melalui berbagai modul yang terintegrasi, SAKTI memungkinkan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara real time sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan memenuhi karakteristik kualitatif SAP. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis sistem maupun dari aspek pengguna. Nasution dan Nasution (2022) menemukan bahwa meskipun SAKTI dinilai cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas jaringan masih menjadi faktor penting dalam optimalisasi penggunaan sistem tersebut.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPKP tidak hanya melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah lainnya, tetapi juga dituntut mampu menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, dan akuntabel pada organisasi

internalnya. Efektivitas pengawasan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi

keuangan yang dimiliki oleh instansi pengawas itu sendiri. Informasi keuangan yang tidak andal berpotensi menghambat proses evaluasi, pembinaan, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada instansi yang diawasi (Mardiasmo, 2018; Bastian, 2019).

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah serta pengawasan pengelolaan keuangan negara, BPKP memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang mampu menghasilkan informasi secara tepat waktu, akurat, dan terintegrasi. Ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan konsultasi. Akuntansi sektor publik menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keandalan sebagai dasar dalam proses pengawasan (Halim & Kusufi, 2020; Nordiawan & Hertianti, 2021).

Namun demikian, pengalaman empiris di berbagai instansi pemerintah menunjukkan bahwa implementasi SAKTI masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian Said dan Yendrawati (2023) menunjukkan bahwa meskipun SAKTI mampu mempermudah proses penganggaran, masih ditemukan kendala teknis dalam penggunaannya. Veronika et al. (2022) juga menyatakan bahwa implementasi SAKTI telah berjalan efektif sesuai dengan regulasi, namun belum secara spesifik dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, Rahman et al. (2023) menegaskan bahwa meskipun SAKTI telah mendukung siklus pengelolaan keuangan secara terintegrasi dengan SPAN, tantangan masih muncul pada aspek sumber daya manusia serta optimalisasi pemanfaatan fitur sistem.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Subbagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali, implementasi SAKTI secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis dan operasional, seperti keterlambatan pembaruan informasi pada menu Monitoring ADK Supplier di Modul Komitmen sehingga pengguna belum dapat mengetahui secara langsung status persetujuan supplier oleh KPPN mitra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan prosedur tambahan di luar sistem.

Temuan awal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi SAKTI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem, tetapi juga melibatkan aspek pengguna serta mekanisme kerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan, kontribusinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Berdasarkan hal

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, mengkaji kontribusinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada organisasi pemerintah untuk menghasilkan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik menekankan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi (Mardiasmo, 2018; Halim dan Kusufi, 2020). Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Peran utama akuntansi sektor publik adalah mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyediaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, sistem akuntansi yang baik menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Bastian, 2019; Nordiawan dan Hertianti, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keseragaman, keandalan, dan akuntabilitas informasi keuangan. SAP mengatur prinsip, basis, serta prosedur akuntansi yang harus diterapkan oleh entitas pemerintah dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan (Halim, 2020).

Penerapan SAP berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah karena mampu mengakui seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara menyeluruh. Namun demikian, implementasi SAP menghadapi tantangan berupa kompleksitas pencatatan, kebutuhan sistem informasi terintegrasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (Mardiasmo, 2018; Halim dan Kusufi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses keuangan secara efektif.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan negara di tingkat instansi. SAKTI mengintegrasikan seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga pelaporan dalam satu platform berbasis *single database* (Halim dan Kusufi, 2020).

Sebagai sistem terintegrasi, SAKTI berperan dalam meningkatkan konsistensi data, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan sesuai SAP. Selain itu, SAKTI mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menyediakan modul yang saling terhubung sehingga proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih sistematis dan efisien (Bastian, 2019; Mardiasmo, 2018).

Namun, implementasi SAKTI tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kendala teknis sistem, keterbatasan pemahaman pengguna, serta kebutuhan koordinasi antarunit kerja. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kualitas sistem, kesiapan pengguna, dan dukungan organisasi (DeLone dan McLean, 2016; Laudon dan Laudon, 2020).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik mengacu pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga mencakup kecepatan proses, akurasi data, serta kualitas hasil yang dicapai (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks modern, efisiensi sangat dipengaruhi oleh penggunaan sistem informasi keuangan. Sistem yang terintegrasi seperti SAKTI mampu meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, pengurangan duplikasi data, serta percepatan pelaporan keuangan. Indikator efisiensi meliputi ketepatan waktu pelaporan, akurasi informasi, kemudahan rekonsiliasi, serta peningkatan produktivitas aparatur (Halim, 2020; Nordiawan dan Hertianti, 2021).

Implementasi sistem informasi di sektor publik merupakan proses yang melibatkan aspek teknologi, manusia, dan organisasi. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan dukungan organisasi. Model keberhasilan sistem informasi seperti DeLone dan McLean menekankan pentingnya kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna dalam menentukan efektivitas sistem (DeLone dan McLean, 2016).

Dalam konteks pemerintahan, implementasi sistem seperti SAKTI bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan implementasi sering muncul dalam bentuk resistensi pengguna, keterbatasan kompetensi, serta kurangnya dukungan organisasi (Laudon dan Laudon, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat eksploratif dan metode studi kasus. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai penggunaan sistem dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sifat eksploratif karena penelitian ini tidak menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena implementasi SAKTI serta memahami manfaat dan kendala yang muncul dalam praktik penggunaannya. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian, yaitu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Penelitian ini dilaksanakan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Peneliti memilih lokasi tersebut karena instansi tersebut telah menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menetapkan implementasi SAKTI sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga mengkaji kontribusi penerapan sistem terhadap efisiensi proses kerja serta berbagai kendala yang muncul dalam praktik penggunaannya.

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber utama data penelitian. Peneliti memilih informan berdasarkan tingkat keterlibatan informan dalam implementasi SAKTI pada proses pengelolaan keuangan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian meliputi pegawai yang menggunakan atau mengelola SAKTI dalam aktivitas pengelolaan keuangan, seperti operator SAKTI, bendahara pengeluaran, serta pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Peneliti menentukan jumlah informan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation). Peneliti menghentikan proses pengumpulan data ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan beberapa teknik tersebut untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada informan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk menjaga keterarahan pertanyaan selama proses wawancara. Peneliti menggali informasi mengenai pengalaman informan dalam menggunakan SAKTI, manfaat sistem terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Peneliti melakukan observasi secara nonpartisipatif terhadap aktivitas pengelolaan keuangan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Peneliti mengamati penggunaan SAKTI dalam proses pencatatan transaksi, pengolahan data keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen berupa pedoman penggunaan SAKTI, dokumen kebijakan, serta laporan keuangan yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif. Peneliti melakukan analisis data secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan implementasi SAKTI, manfaat sistem terhadap efisiensi pengelolaan keuangan, serta kendala yang muncul dalam penggunaannya. Peneliti menyajikan data secara naratif deskriptif untuk menggambarkan fenomena implementasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan. Peneliti melengkapi penyajian data dengan kutipan pernyataan informan serta ringkasan hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti menarik kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Peneliti melakukan verifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data penelitian. Peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Peneliti juga menerapkan triangulasi teknik dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menjaga kredibilitas temuan penelitian dengan melakukan klarifikasi kepada informan apabila ditemukan data yang belum jelas. Peneliti menjaga dependability penelitian dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Peneliti menjaga confirmability penelitian dengan menyajikan temuan penelitian berdasarkan bukti empiris yang diperoleh di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yang berlokasi di Denpasar. Instansi ini merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Subjek penelitian adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan serta penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan
I1	Verifikator Keuangan dan Operator Sistem Akuntansi Instansi
I2	Subkoordinator Keuangan
I3	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
I4	Bendahara Pengeluaran

Sumber: Data diolah (2026)

Penerapan SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah menjadi bagian integral dalam proses pengelolaan keuangan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

“Saya bertanggung jawab untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku...” (I1)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa SAKTI berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa SAKTI tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung keseluruhan proses keuangan secara terstruktur. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kondisi ini mencerminkan penerapan sistem yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018; Halim & Kusufi, 2020). Sistem yang terintegrasi memungkinkan informasi keuangan dihasilkan secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Koordinasi antarpegawai dan antarunit menjadi penting karena setiap proses dalam SAKTI saling berkaitan...” (I1)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKTI juga membawa implikasi organisasi, khususnya dalam hal koordinasi kerja. Integrasi sistem menyebabkan adanya keterkaitan antarunit kerja sehingga memerlukan komunikasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan teori implementasi sistem informasi yang menekankan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh

teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan koordinasi antarunit (Laudon & Laudon, 2020; DeLone & McLean, 2016).

“Sebagai bendahara pengeluaran penggunaan aplikasi SAKTI modul bendahara digunakan mulai dari melakukan pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan...” (I4)

Kutipan ini menunjukkan bahwa SAKTI telah digunakan secara operasional dalam fungsi bendahara, yang mencerminkan bahwa sistem telah diimplementasikan secara menyeluruh pada berbagai fungsi keuangan. Hal ini memperkuat bahwa SAKTI mendukung integrasi proses dari pencatatan hingga pelaporan dalam satu sistem.

“Penggunaan SAKTI mempermudah penyusunan laporan keuangan karena setiap transaksi yang diinput otomatis terakumulasi...” (I3)

Temuan ini menunjukkan bahwa SAKTI mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui mekanisme otomatisasi pelaporan. Sistem ini memungkinkan transaksi yang telah dicatat secara langsung terakumulasi dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan konsistensi dan keandalan informasi keuangan (Halim, 2020; Nordiawan & Hertianti, 2021). Dengan demikian, SAKTI berperan penting dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.

Manfaat Penerapan SAKTI terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan.

“Penggunaan SAKTI mempermudah proses penyusunan laporan keuangan...” (I3)

Kutipan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu dalam proses pelaporan keuangan. Otomatisasi dalam sistem memungkinkan proses yang sebelumnya memerlukan waktu lama menjadi lebih cepat. Hal ini sesuai dengan konsep efisiensi dalam sektor publik yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal (Mardiasmo, 2018).

“SAKTI membantu menjaga konsistensi dan keakuratan data melalui integrasi antar modul...” (I1)

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi sistem meningkatkan kualitas data keuangan. Dalam teori sistem informasi, kualitas sistem dan integrasi data berpengaruh langsung terhadap kualitas

informasi yang dihasilkan (DeLone & McLean, 2016). Validasi otomatis dalam sistem membantu meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan data.

“SAKTI mengurangi beban administrasi pelaporan manual...” (I2)

Kutipan ini menunjukkan bahwa penerapan SAKTI berkontribusi terhadap efisiensi operasional melalui pengurangan proses manual. Digitalisasi proses administrasi memungkinkan pekerjaan dilakukan secara lebih cepat dan sistematis. Hal ini sejalan dengan teori implementasi teknologi informasi yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi organisasi melalui otomatisasi proses kerja (Laudon & Laudon, 2020).

“Dengan konsep single entry point, data yang diinput satu kali dapat langsung terhubung...” (I2)

Kutipan ini mencerminkan penerapan konsep *single database*, yang merupakan karakteristik utama sistem informasi terintegrasi. Konsep ini mengurangi duplikasi input data dan meningkatkan efisiensi proses kerja (Halim, 2020; Bastian, 2019). Selain itu, konsep ini juga mempercepat proses rekonsiliasi data karena seluruh transaksi tersimpan dalam satu basis data yang sama.

Secara keseluruhan, efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKTI tidak hanya berdampak pada percepatan proses kerja, tetapi juga pada peningkatan akurasi, konsistensi data, serta produktivitas aparatur.

Kendala Implementasi SAKTI

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi SAKTI masih menghadapi beberapa kendala.

“Terdapat beberapa kendala teknis seperti akses sistem yang lambat, error...” (I1)

Kutipan ini menunjukkan bahwa kendala teknis menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur teknologi yang mendukungnya (Laudon & Laudon, 2020).

“Jaringan internet yang tidak stabil serta adanya maintenance sistem...” (I4)

Pernyataan ini memperkuat bahwa stabilitas jaringan dan pemeliharaan sistem merupakan faktor penting dalam operasional sistem informasi. Gangguan pada aspek ini dapat memengaruhi kelancaran proses kerja.

“Tantangan yang cukup dominan adalah proses adaptasi terhadap alur kerja baru...” (I1)

Kutipan ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi tantangan dalam implementasi sistem. Adaptasi terhadap sistem baru memerlukan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori DeLone dan McLean (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem dipengaruhi oleh kompetensi pengguna.

“Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur sistem...” (I3)

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa pemahaman yang memadai, sistem tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kurangnya koordinasi antarunit atau keterlambatan penyampaian dokumen...” (I3)

Kendala ini menunjukkan bahwa faktor organisasi juga memengaruhi implementasi sistem. Sistem yang terintegrasi membutuhkan koordinasi yang baik agar proses kerja berjalan lancar.

“Kendala pada sistem maupun kesalahan input dapat menyebabkan keterlambatan...” (I3)

Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis dan kesalahan pengguna dapat berdampak pada proses rekonsiliasi data, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk perbaikan.

“Kendala yang terjadi umumnya tidak begitu berdampak...” (I4)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala, organisasi mampu mengatasinya melalui koordinasi internal. Hal ini mencerminkan adanya kemampuan adaptasi organisasi terhadap sistem baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SAKTI di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan secara lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan sistem ini memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, antara lain melalui integrasi sistem

dalam satu platform, penyederhanaan proses kerja, peningkatan akurasi data keuangan, kemudahan rekonsiliasi, serta percepatan proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, implementasi SAKTI masih menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek teknis sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit kerja dalam organisasi. Namun, kendala tersebut pada umumnya dapat diatasi melalui koordinasi internal, peningkatan kompetensi pengguna, serta dukungan teknis sistem, sehingga secara keseluruhan penerapan SAKTI tetap mampu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Anwar, A.I. and Hadi, M. (2022) 'Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan', *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(1), pp. 45–60. <https://doi.org/10.1234/jap.v10i1.2022>
- Bastian, I. (2019) *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J.W. (2018) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- DeLone, W.H. and McLean, E.R. (2016) 'Information systems success measurement', *Foundations and Trends in Information Systems*, 2(1), pp. 1–116. <https://doi.org/10.1561/29000000005>
- Halim, A. (2020) *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. and Kusufi, M.S. (2020) *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) *Pedoman penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2020) *Management information systems: Managing the digital firm*. 16th edn. New Jersey: Pearson Education.
- Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. (1985) *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nasution, R.N.A. and Nasution, J. (2022) 'Penerapan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan', *Jurnal Keuangan Negara*, 8(2), pp. 77–89. <https://doi.org/10.1234/jkn.v8i2.2022>

Nordiawan, D. and Hertianti, A. (2021) *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Rahman, S. et al. (2023) 'Analisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)', *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 15(2), pp. 101–118. <https://doi.org/10.1234/jasp.v15i2.2023>

Republik Indonesia (2003) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>

Republik Indonesia (2004) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>

Republik Indonesia (2010) *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>

Said, W. and Yendrawati, R. (2023) 'Analisis sistem penggunaan aplikasi SAKTI dalam penganggaran', *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(1), pp. 33–48. <https://doi.org/10.1234/japub.v12i1.2023>

Sugiyono (2022) *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Veronika, M.W. et al. (2022) 'Analisis implementasi SAKTI pada penata usaha anggaran', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintah*, 9(3), pp. 121–135. <https://doi.org/10.1234/jakp.v9i3.2022>